



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1202, 2017

KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.07/2017

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan indeks kemampuan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
- b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFDi = [Pendapatan] - [Pendapatan *Earmarked* + Belanja]$$

$$KFDi = [PAD + DBH + DAU + Otsus + Dais + TPG/Tamsil] - [DTK + PR TDP + DBH SDA TDP + DBH CHT TDP + BBH + BBK + BB + BP]$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

Otsus = Dana Otonomi Khusus

Dais = Dana Keistimewaan DIY

TPG/Tamsil = Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

DTK = Dana Transfer Khusus

PR TDP = Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHSDA TDP = DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP = DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH = Belanja Bagi Hasil

BBK = Belanja Bantuan Keuangan

BB = Belanja Bunga

BP = Belanja Pegawai

- (2) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_i = [\text{Penerimaan Umum APBD}] - [\text{Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya} + \text{Belanja}]$$

$$KFD_i = [\text{PAD} + \text{BHP} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{Otsus} + \text{TPG/Tamsil}] - [\text{DTK} + \text{PR TDP} + \text{DBH DR TDP} + \text{DBH CHT TDP} + \text{BBH} + \text{BH DOB} + \text{DD} + \text{ADD} + \text{Otsus} + \text{BP} + \text{BB}]$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHP = Bagi Hasil Provinsi

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

Otsus = Dana Otonomi Khusus

TPG/Tamsil = Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

PR TDP = Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHDR TDP = DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP = DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH = Belanja Bagi Hasil

BH DOB = Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru

DD = Dana Desa

ADD = Alokasi Dana Desa

Otsus = Dana Otonomi Khusus

BP = Belanja Pegawai

BB = Belanja Bunga

- (3) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_i = \frac{KFD_i}{(\sum KFD_i)/n}$$

Keterangan:

IKFD_i = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

KFD_i = Kapasitas Fiskal Daerah

n = Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) atau kabupaten/kota sebanyak 508 (lima ratus delapan)

- (4) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah.
- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing daerah provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah provinsi.
- (6) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah kabupaten/kota.
- (7) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2,0 (dua koma nol) ($IKFD \geq 2,0$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
 - b. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,02 (satu koma nol dua) sampai kurang dari 2,0 (dua koma nol) ($1,02 \leq IKFD < 2,0$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
 - c. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,54 (nol koma lima empat) sampai kurang dari 1,02 (satu koma nol

- dua) ($0,54 \leq \text{IKFD} < 1,02$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang;
- d. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,36 (nol koma tiga enam) sampai kurang dari 0,54 (nol koma lima empat) ($0,36 \leq \text{IKFD} < 0,54$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan
- e. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,36 (nol koma tiga enam) ($\text{IKFD} < 0,36$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.
- (8) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
- a. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2,05 (dua koma nol lima) ($\text{IKFD} \geq 2,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
- b. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,14 (satu koma satu empat) sampai kurang dari 2,05 (dua koma nol lima) ($1,14 \leq \text{IKFD} < 2,05$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
- c. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,72 (nol koma tujuh dua) sampai kurang dari 1,14 (satu koma satu empat) ($0,72 \leq \text{IKFD} < 1,14$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang;
- d. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,53 (nol koma lima tiga) sampai kurang dari 0,72 (nol koma tujuh dua) ($0,53 \leq \text{IKFD} < 0,72$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan

- e. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,53 (nol koma lima tiga) ($IKFD \leq 0,53$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

Pasal 5

Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 400), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1	Prov. Aceh	1,02	Tinggi
2	Prov. Sumatera Utara	0,79	Sedang
3	Prov. Sumatera Barat	0,53	Rendah
4	Prov. Riau	1,06	Tinggi
5	Prov. Jambi	0,46	Rendah
6	Prov. Sumatera Selatan	1,16	Tinggi
7	Prov. Bengkulu	0,31	Sangat Rendah
8	Prov. Lampung	0,56	Sedang
9	Prov. DKI Jakarta	7,87	Sangat Tinggi
10	Prov. Jawa Barat	2,86	Sangat Tinggi
11	Prov. Jawa Tengah	1,06	Tinggi
12	Prov. DI Yogyakarta	0,51	Rendah
13	Prov. Jawa Timur	3,14	Sangat Tinggi
14	Prov. Kalimantan Barat	0,48	Rendah
15	Prov. Kalimantan Tengah	0,61	Sedang
16	Prov. Kalimantan Selatan	0,70	Sedang
17	Prov. Kalimantan Timur	1,63	Tinggi
18	Prov. Sulawesi Utara	0,37	Rendah
19	Prov. Sulawesi Tengah	0,36	Sangat Rendah
20	Prov. Sulawesi Selatan	0,68	Sedang
21	Prov. Sulawesi Tenggara	0,35	Sangat Rendah
22	Prov. Bali	0,74	Sedang
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	0,45	Rendah
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	0,39	Rendah
25	Prov. Maluku	0,29	Sangat Rendah
26	Prov. Papua	2,00	Sangat Tinggi
27	Prov. Maluku Utara	0,30	Sangat Rendah
28	Prov. Banten	1,00	Sedang
29	Prov. Bangka Belitung	0,25	Sangat Rendah
30	Prov. Gorontalo	0,23	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
31	Prov. Kepulauan Riau	0,44	Rendah
32	Prov. Papua Barat	0,83	Sedang
33	Prov. Sulawesi Barat	0,25	Sangat Rendah
34	Prov. Kalimantan Utara	0,33	Sangat Rendah

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
1	Kab. Aceh Barat	0,61	Rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,64	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,60	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,24	Sangat Rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,73	Sedang
6	Kab. Aceh Tenggara	0,56	Rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,66	Rendah
8	Kab. Aceh Utara	1,10	Sedang
9	Kab. Bireuen	0,79	Sedang
10	Kab. Pidie	0,87	Sedang
11	Kab. Simeulue	0,35	Sangat Rendah
12	Kota Banda Aceh	0,83	Sedang
13	Kota Sabang	0,33	Sangat Rendah
14	Kota Langsa	0,45	Sangat Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,48	Sangat Rendah
16	Kab. Gayo Lues	0,55	Rendah
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,21	Sangat Rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,46	Sangat Rendah
19	Kab. Nagan Raya	0,65	Rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	0,56	Rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,51	Sangat Rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,43	Sangat Rendah
23	Kota Subulussalam	0,20	Sangat Rendah
24	Kab. Asahan	0,97	Sedang
25	Kab. Dairi	0,58	Rendah
26	Kab. Deli Serdang	1,62	Tinggi
27	Kab. Karo	1,13	Sedang
28	Kab. Labuhanbatu	0,65	Rendah
29	Kab. Langkat	1,12	Sedang
30	Kab. Mandailing Natal	0,76	Sedang
31	Kab. Nias	0,42	Sangat Rendah
32	Kab. Simalungun	0,77	Sedang
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,67	Rendah
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,43	Sangat Rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,71	Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
36	Kab. Toba Samosir	0,49	Sangat Rendah
37	Kota Binjai	0,59	Rendah
38	Kota Medan	4,62	Sangat Tinggi
39	Kota Pematang Siantar	0,43	Sangat Rendah
40	Kota Sibolga	0,40	Sangat Rendah
41	Kota Tanjung Balai	0,50	Sangat Rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,54	Rendah
43	Kota Padang Sidempuan	0,42	Sangat Rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	0,38	Sangat Rendah
45	Kab. Nias Selatan	0,45	Sangat Rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,54	Rendah
47	Kab. Serdang Bedagai	0,67	Rendah
48	Kab. Samosir	0,49	Sangat Rendah
49	Kab. Batu Bara	0,61	Rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,43	Sangat Rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,47	Sangat Rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,52	Sangat Rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,57	Rendah
54	Kab. Nias Utara	0,41	Sangat Rendah
55	Kab. Nias Barat	0,52	Sangat Rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,45	Sangat Rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,64	Rendah
58	Kab. Agam	0,60	Rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	0,87	Sedang
60	Kab. Padang Pariaman	0,56	Rendah
61	Kab. Pasaman	0,66	Rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,80	Sedang
63	Kab. Sijunjung	0,45	Sangat Rendah
64	Kab. Solok	0,63	Rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,60	Rendah
66	Kota Bukittinggi	0,31	Sangat Rendah
67	Kota Padang Panjang	0,41	Sangat Rendah
68	Kota Padang	1,30	Tinggi
69	Kota Payakumbuh	0,39	Sangat Rendah
70	Kota Sawahlunto	0,47	Sangat Rendah
71	Kota Solok	0,42	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
72	Kota Pariaman	0,41	Sangat Rendah
73	Kab. Pasaman Barat	0,65	Rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,61	Rendah
75	Kab. Solok Selatan	0,58	Rendah
76	Kab. Bengkulu	2,69	Sangat Tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	1,13	Sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	0,88	Sedang
79	Kab. Kampar	1,05	Sedang
80	Kab. Kuantan Singingi	0,43	Sangat Rendah
81	Kab. Pelalawan	1,28	Tinggi
82	Kab. Rokan Hilir	1,12	Sedang
83	Kab. Rokan Hulu	0,87	Sedang
84	Kab. Siak	1,71	Tinggi
85	Kota Dumai	0,58	Rendah
86	Kota Pekanbaru	1,99	Tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,82	Sedang
88	Kab. Batanghari	0,42	Sangat Rendah
89	Kab. Bungo	0,50	Sangat Rendah
90	Kab. Kerinci	0,45	Sangat Rendah
91	Kab. Merangin	0,55	Rendah
92	Kab. Muaro Jambi	0,82	Sedang
93	Kab. Sarolangun	0,56	Rendah
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,74	Sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,54	Rendah
96	Kab. Tebo	0,64	Rendah
97	Kota Jambi	1,04	Sedang
98	Kota Sungai Penuh	0,47	Sangat Rendah
99	Kab. Lahat	1,43	Tinggi
100	Kab. Musi Banyuasin	2,00	Tinggi
101	Kab. Musi Rawas	1,02	Sedang
102	Kab. Muara Enim	2,01	Tinggi
103	Kab. Ogan Komering Ilir	1,16	Tinggi
104	Kab. Ogan Komering Ulu	1,78	Tinggi
105	Kota Palembang	2,16	Sangat Tinggi
106	Kota Prabumulih	0,70	Rendah
107	Kota Pagar Alam	0,73	Sedang

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
108	Kota Lubuk Linggau	0,67	Rendah
109	Kab. Banyuasin	1,36	Tinggi
110	Kab. Ogan Ilir	0,84	Sedang
111	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,78	Sedang
112	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,71	Rendah
113	Kab. Empat Lawang	0,67	Rendah
114	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,49	Sangat Rendah
115	Kab. Musi Rawas Utara	0,74	Sedang
116	Kab. Bengkulu Selatan	0,50	Sangat Rendah
117	Kab. Bengkulu Utara	0,66	Rendah
118	Kab. Rejang Lebong	0,46	Sangat Rendah
119	Kota Bengkulu	0,55	Rendah
120	Kab. Kaur	0,45	Sangat Rendah
121	Kab. Seluma	0,46	Sangat Rendah
122	Kab. Mukomuko	0,56	Rendah
123	Kab. Lebong	0,40	Sangat Rendah
124	Kab. Kepahiang	0,42	Sangat Rendah
125	Kab. Bengkulu Tengah	0,51	Sangat Rendah
126	Kab. Lampung Barat	0,65	Rendah
127	Kab. Lampung Selatan	0,81	Sedang
128	Kab. Lampung Tengah	1,04	Sedang
129	Kab. Lampung Utara	0,61	Rendah
130	Kab. Lampung Timur	1,03	Sedang
131	Kab. Tanggamus	0,47	Sangat Rendah
132	Kab. Tulang Bawang	0,69	Rendah
133	Kab. Way Kanan	0,54	Rendah
134	Kota Bandar Lampung	1,31	Tinggi
135	Kota Metro	0,58	Rendah
136	Kab. Pesawaran	0,51	Sangat Rendah
137	Kab. Pringsewu	0,52	Sangat Rendah
138	Kab. Mesuji	0,54	Rendah
139	Kab. Tulang Bawang Barat	0,55	Rendah
140	Kab. Pesisir Barat	0,59	Rendah
141	Kab. Bandung	3,44	Sangat Tinggi
142	Kab. Bekasi	5,26	Sangat Tinggi
143	Kab. Bogor	6,24	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
144	Kab. Ciamis	1,62	Tinggi
145	Kab. Cianjur	1,76	Tinggi
146	Kab. Cirebon	2,04	Tinggi
147	Kab. Garut	2,33	Sangat Tinggi
148	Kab. Indramayu	1,67	Tinggi
149	Kab. Karawang	1,66	Tinggi
150	Kab. Kuningan	0,87	Sedang
151	Kab. Majalengka	1,68	Tinggi
152	Kab. Purwakarta	1,50	Tinggi
153	Kab. Subang	1,24	Tinggi
154	Kab. Sukabumi	2,53	Sangat Tinggi
155	Kab. Sumedang	1,83	Tinggi
156	Kab. Tasikmalaya	1,65	Tinggi
157	Kota Bandung	5,15	Sangat Tinggi
158	Kota Bekasi	4,87	Sangat Tinggi
159	Kota Bogor	1,74	Tinggi
160	Kota Cirebon	1,14	Sedang
161	Kota Depok	2,81	Sangat Tinggi
162	Kota Sukabumi	0,95	Sedang
163	Kota Tasikmalaya	1,43	Tinggi
164	Kota Cimahi	0,99	Sedang
165	Kota Banjar	0,81	Sedang
166	Kab. Bandung Barat	1,83	Tinggi
167	Kab. Pangandaran	1,00	Sedang
168	Kab. Banjarnegara	1,04	Sedang
169	Kab. Banyumas	2,02	Tinggi
170	Kab. Batang	0,92	Sedang
171	Kab. Blora	0,97	Sedang
172	Kab. Boyolali	1,33	Tinggi
173	Kab. Brebes	1,87	Tinggi
174	Kab. Cilacap	2,20	Sangat Tinggi
175	Kab. Demak	1,42	Tinggi
176	Kab. Grobogan	1,55	Tinggi
177	Kab. Jepara	1,13	Sedang
178	Kab. Karanganyar	1,26	Tinggi
179	Kab. Kebumen	1,47	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
180	Kab. Kendal	0,85	Sedang
181	Kab. Klaten	1,28	Tinggi
182	Kab. Kudus	1,27	Tinggi
183	Kab. Magelang	1,33	Tinggi
184	Kab. Pati	1,49	Tinggi
185	Kab. Pekalongan	1,03	Sedang
186	Kab. Pemalang	1,17	Tinggi
187	Kab. Purbalingga	1,06	Sedang
188	Kab. Purworejo	1,12	Sedang
189	Kab. Rembang	0,73	Sedang
190	Kab. Semarang	1,19	Tinggi
191	Kab. Sragen	1,27	Tinggi
192	Kab. Sukoharjo	0,98	Sedang
193	Kab. Tegal	1,50	Tinggi
194	Kab. Temanggung	1,00	Sedang
195	Kab. Wonogiri	1,05	Sedang
196	Kab. Wonosobo	1,00	Sedang
197	Kota Magelang	0,75	Sedang
198	Kota Pekalongan	0,77	Sedang
199	Kota Salatiga	0,58	Rendah
200	Kota Semarang	3,49	Sangat Tinggi
201	Kota Surakarta	1,25	Tinggi
202	Kota Tegal	0,87	Sedang
203	Kab. Bantul	1,46	Tinggi
204	Kab. Gunung Kidul	0,59	Rendah
205	Kab. Kulonprogo	0,73	Sedang
206	Kab. Sleman	1,80	Tinggi
207	Kota Yogyakarta	1,14	Sedang
208	Kab. Bangkalan	0,84	Sedang
209	Kab. Banyuwangi	2,11	Sangat Tinggi
210	Kab. Blitar	1,53	Tinggi
211	Kab. Bojonegoro	2,77	Sangat Tinggi
212	Kab. Bondowoso	1,44	Tinggi
213	Kab. Gresik	2,54	Sangat Tinggi
214	Kab. Jember	2,16	Sangat Tinggi
215	Kab. Jombang	1,73	Tinggi

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
216	Kab. Kediri	1,61	Tinggi
217	Kab. Lamongan	1,96	Tinggi
218	Kab. Lumajang	1,17	Tinggi
219	Kab. Madiun	1,06	Sedang
220	Kab. Magetan	0,85	Sedang
221	Kab. Malang	2,71	Sangat Tinggi
222	Kab. Mojokerto	1,76	Tinggi
223	Kab. Nganjuk	1,38	Tinggi
224	Kab. Ngawi	1,31	Tinggi
225	Kab. Pacitan	0,61	Rendah
226	Kab. Pamekasan	1,22	Tinggi
227	Kab. Pasuruan	1,56	Tinggi
228	Kab. Ponorogo	1,00	Sedang
229	Kab. Probolinggo	1,34	Tinggi
230	Kab. Sampang	1,55	Tinggi
231	Kab. Sidoarjo	3,61	Sangat Tinggi
232	Kab. Situbondo	1,10	Sedang
233	Kab. Sumenep	1,19	Tinggi
234	Kab. Trenggalek	1,01	Sedang
235	Kab. Tuban	1,14	Tinggi
236	Kab. Tulungagung	1,85	Tinggi
237	Kota Blitar	0,72	Rendah
238	Kota Kediri	0,97	Sedang
239	Kota Madiun	0,82	Sedang
240	Kota Malang	1,54	Tinggi
241	Kota Mojokerto	0,73	Sedang
242	Kota Pasuruan	0,68	Rendah
243	Kota Probolinggo	0,66	Rendah
244	Kota Surabaya	8,53	Sangat Tinggi
245	Kota Batu	0,71	Rendah
246	Kab. Bengkayang	0,82	Sedang
247	Kab. Landak	1,09	Sedang
248	Kab. Kapuas Hulu	1,45	Tinggi
249	Kab. Ketapang	1,63	Tinggi
250	Kab. Mempawah	0,46	Sangat Rendah
251	Kab. Sambas	0,93	Sedang

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
252	Kab. Sanggau	0,93	Sedang
253	Kab. Sintang	1,22	Tinggi
254	Kota Pontianak	1,70	Tinggi
255	Kota Singkawang	0,58	Rendah
256	Kab. Sekadau	0,70	Rendah
257	Kab. Melawi	0,80	Sedang
258	Kab. Kayong Utara	0,56	Rendah
259	Kab. Kubu Raya	1,08	Sedang
260	Kab. Barito Selatan	0,66	Rendah
261	Kab. Barito Utara	0,73	Sedang
262	Kab. Kapuas	1,04	Sedang
263	Kab. Kotawaringin Barat	1,10	Sedang
264	Kab. Kotawaringin Timur	1,46	Tinggi
265	Kota Palangka Raya	0,80	Sedang
266	Kab. Katingan	1,04	Sedang
267	Kab. Seruyan	0,88	Sedang
268	Kab. Sukamara	0,66	Rendah
269	Kab. Lamandau	0,75	Sedang
270	Kab. Gunung Mas	0,70	Rendah
271	Kab. Pulang Pisau	0,72	Rendah
272	Kab. Murung Raya	1,24	Tinggi
273	Kab. Barito Timur	0,71	Rendah
274	Kab. Banjar	1,06	Sedang
275	Kab. Barito Kuala	0,78	Sedang
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,79	Sedang
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,74	Sedang
278	Kab. Hulu Sungai Utara	0,87	Sedang
279	Kab. Kotabaru	1,54	Tinggi
280	Kab. Tabalong	1,01	Sedang
281	Kab. Tanah Laut	1,24	Tinggi
282	Kab. Tapin	1,07	Sedang
283	Kota Banjarbaru	0,87	Sedang
284	Kota Banjarmasin	1,20	Tinggi
285	Kab. Balangan	1,03	Sedang
286	Kab. Tanah Bumbu	1,53	Tinggi
287	Kab. Berau	2,80	Sangat Tinggi

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
288	Kab. Kutai Kartanegara	4,80	Sangat Tinggi
289	Kab. Kutai Barat	3,00	Sangat Tinggi
290	Kab. Kutai Timur	4,15	Sangat Tinggi
291	Kab. Paser	2,03	Tinggi
292	Kota Balikpapan	2,94	Sangat Tinggi
293	Kota Bontang	1,43	Tinggi
294	Kota Samarinda	3,29	Sangat Tinggi
295	Kab. Penajam Paser Utara	1,12	Sedang
296	Kab. Mahakam Ulu	1,53	Tinggi
297	Kab. Bolaang Mongondow	0,52	Sangat Rendah
298	Kab. Minahasa	0,60	Rendah
299	Kab. Kepulauan Sangihe	0,40	Sangat Rendah
300	Kota Bitung	0,55	Rendah
301	Kota Manado	1,63	Tinggi
302	Kab. Kepulauan Talaud	0,41	Sangat Rendah
303	Kab. Minahasa Selatan	0,49	Sangat Rendah
304	Kota Tomohon	0,32	Sangat Rendah
305	Kab. Minahasa Utara	0,50	Sangat Rendah
306	Kota Kotamobagu	0,39	Sangat Rendah
307	Kab. Minahasa Tenggara	0,41	Sangat Rendah
308	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,38	Sangat Rendah
309	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0,40	Sangat Rendah
310	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,39	Sangat Rendah
311	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,42	Sangat Rendah
312	Kab. Banggai	0,93	Sedang
313	Kab. Banggai Kepulauan	0,34	Sangat Rendah
314	Kab. Buol	0,46	Sangat Rendah
315	Kab. Toli-Toli	0,62	Rendah
316	Kab. Donggala	0,69	Rendah
317	Kab. Morowali	0,62	Rendah
318	Kab. Poso	0,61	Rendah
319	Kota Palu	0,82	Sedang
320	Kab. Parigi Moutong	0,82	Sedang
321	Kab. Tojo Una-una	0,60	Rendah
322	Kab. Sigi	0,51	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
323	Kab. Banggai Laut	0,46	Sangat Rendah
324	Kab. Morowali Utara	0,68	Rendah
325	Kab. Bantaeng	0,53	Sangat Rendah
326	Kab. Barru	0,61	Rendah
327	Kab. Bone	1,11	Sedang
328	Kab. Bulukumba	0,89	Sedang
329	Kab. Enrekang	0,40	Sangat Rendah
330	Kab. Gowa	0,93	Sedang
331	Kab. Jeneponto	0,64	Rendah
332	Kab. Luwu	0,87	Sedang
333	Kab. Luwu Utara	0,84	Sedang
334	Kab. Maros	0,80	Sedang
335	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,87	Sedang
336	Kab. Pinrang	0,74	Sedang
337	Kab. Kepulauan Selayar	0,39	Sangat Rendah
338	Kab. Sidenreng Rappang	0,67	Rendah
339	Kab. Sinjai	0,48	Sangat Rendah
340	Kab. Soppeng	0,56	Rendah
341	Kab. Takalar	0,47	Sangat Rendah
342	Kab. Tana Toraja	0,40	Sangat Rendah
343	Kab. Wajo	0,85	Sedang
344	Kota Parepare	0,63	Rendah
345	Kota Makassar	2,72	Sangat Tinggi
346	Kota Palopo	0,39	Sangat Rendah
347	Kab. Luwu Timur	0,95	Sedang
348	Kab. Toraja Utara	0,55	Rendah
349	Kab. Buton	0,18	Sangat Rendah
350	Kab. Konawe	0,62	Rendah
351	Kab. Kolaka	0,64	Rendah
352	Kab. Muna	0,35	Sangat Rendah
353	Kota Kendari	0,69	Rendah
354	Kota Bau-Bau	0,47	Sangat Rendah
355	Kab. Konawe Selatan	0,69	Rendah
356	Kab. Bombana	0,55	Rendah
357	Kab. Wakatobi	0,52	Sangat Rendah
358	Kab. Kolaka Utara	0,60	Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
359	Kab. Konawe Utara	0,69	Rendah
360	Kab. Buton Utara	0,55	Rendah
361	Kab. Kolaka Timur	0,48	Sangat Rendah
362	Kab. Konawe Kepulauan	0,51	Sangat Rendah
363	Kab. Muna Barat	0,24	Sangat Rendah
364	Kab. Buton Tengah	0,22	Sangat Rendah
365	Kab. Buton Selatan	0,13	Sangat Rendah
366	Kab. Badung	4,89	Sangat Tinggi
367	Kab. Bangli	0,45	Sangat Rendah
368	Kab. Buleleng	1,61	Tinggi
369	Kab. Gianyar	1,30	Tinggi
370	Kab. Jembrana	0,61	Rendah
371	Kab. Karangasem	1,00	Sedang
372	Kab. Klungkung	0,70	Rendah
373	Kab. Tabanan	1,15	Tinggi
374	Kota Denpasar	1,87	Tinggi
375	Kab. Bima	0,59	Rendah
376	Kab. Dompu	0,47	Sangat Rendah
377	Kab. Lombok Barat	0,84	Sedang
378	Kab. Lombok Tengah	0,91	Sedang
379	Kab. Lombok Timur	0,70	Rendah
380	Kab. Sumbawa	0,49	Sangat Rendah
381	Kota Mataram	0,77	Sedang
382	Kota Bima	0,33	Sangat Rendah
383	Kab. Sumbawa Barat	0,62	Rendah
384	Kab. Lombok Utara	0,60	Rendah
385	Kab. Alor	0,56	Rendah
386	Kab. Belu	0,38	Sangat Rendah
387	Kab. Ende	0,45	Sangat Rendah
388	Kab. Flores Timur	0,45	Sangat Rendah
389	Kab. Kupang	0,53	Rendah
390	Kab. Lembata	0,38	Sangat Rendah
391	Kab. Manggarai	0,54	Rendah
392	Kab. Ngada	0,39	Sangat Rendah
393	Kab. Sikka	0,53	Sangat Rendah
394	Kab. Sumba Barat	0,37	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
395	Kab. Sumba Timur	0,51	Sangat Rendah
396	Kab. Timor Tengah Selatan	0,53	Sangat Rendah
397	Kab. Timor Tengah Utara	0,44	Sangat Rendah
398	Kota Kupang	0,53	Sangat Rendah
399	Kab. Rote Ndao	0,43	Sangat Rendah
400	Kab. Manggarai Barat	0,59	Rendah
401	Kab. Nagekeo	0,38	Sangat Rendah
402	Kab. Sumba Tengah	0,37	Sangat Rendah
403	Kab. Sumba Barat Daya	0,45	Sangat Rendah
404	Kab. Manggarai Timur	0,37	Sangat Rendah
405	Kab. Sabu Raijua	0,42	Sangat Rendah
406	Kab. Malaka	0,45	Sangat Rendah
407	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,62	Rendah
408	Kab. Maluku Tengah	0,55	Rendah
409	Kab. Maluku Tenggara	0,42	Sangat Rendah
410	Kab. Buru	0,49	Sangat Rendah
411	Kota Ambon	0,53	Sangat Rendah
412	Kab. Seram Bagian Barat	0,52	Sangat Rendah
413	Kab. Seram Bagian Timur	0,58	Rendah
414	Kab. Kepulauan Aru	0,56	Rendah
415	Kota Tual	0,46	Sangat Rendah
416	Kab. Maluku Barat Daya	0,81	Sedang
417	Kab. Buru Selatan	0,50	Sangat Rendah
418	Kab. Biak Numfor	0,61	Rendah
419	Kab. Jayapura	0,80	Sedang
420	Kab. Jayawijaya	1,19	Tinggi
421	Kab. Merauke	1,90	Tinggi
422	Kab. Mimika	1,95	Tinggi
423	Kab. Nabire	1,15	Tinggi
424	Kab. Paniai	0,68	Rendah
425	Kab. Puncak Jaya	1,15	Tinggi
426	Kab. Kepulauan Yapen	0,80	Sedang
427	Kota Jayapura	0,93	Sedang
428	Kab. Sarmi	1,26	Tinggi
429	Kab. Keerom	0,85	Sedang
430	Kab. Yahukimo	0,79	Sedang

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
431	Kab. Pegunungan Bintang	1,12	Sedang
432	Kab. Tolikara	1,30	Tinggi
433	Kab. Boven Digoel	1,23	Tinggi
434	Kab. Mappi	1,07	Sedang
435	Kab. Asmat	1,17	Tinggi
436	Kab. Waropen	0,74	Sedang
437	Kab. Supiori	0,60	Rendah
438	Kab. Mamberamo Raya	0,91	Sedang
439	Kab. Mamberamo Tengah	0,83	Sedang
440	Kab. Yalimo	0,97	Sedang
441	Kab. Lanny Jaya	1,11	Sedang
442	Kab. Nduga	0,91	Sedang
443	Kab. Puncak	1,27	Tinggi
444	Kab. Dogiyai	0,75	Sedang
445	Kab. Intan Jaya	1,01	Sedang
446	Kab. Deiyai	0,64	Rendah
447	Kab. Halmahera Tengah	0,53	Sangat Rendah
448	Kota Ternate	0,60	Rendah
449	Kab. Halmahera Barat	0,42	Sangat Rendah
450	Kab. Halmahera Timur	0,58	Rendah
451	Kab. Halmahera Selatan	0,68	Rendah
452	Kab. Halmahera Utara	0,75	Sedang
453	Kab. Kepulauan Sula	0,48	Sangat Rendah
454	Kota Tidore Kepulauan	0,61	Rendah
455	Kab. Pulau Morotai	0,78	Sedang
456	Kab. Pulau Taliabu	0,52	Sangat Rendah
457	Kab. Lebak	1,63	Tinggi
458	Kab. Pandeglang	1,26	Tinggi
459	Kab. Serang	1,95	Tinggi
460	Kab. Tangerang	5,10	Sangat Tinggi
461	Kota Cilegon	1,68	Tinggi
462	Kota Tangerang	4,08	Sangat Tinggi
463	Kota Serang	0,86	Sedang
464	Kota Tangerang Selatan	3,40	Sangat Tinggi
465	Kab. Bangka	0,93	Sedang
466	Kab. Belitung	0,75	Sedang

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
467	Kota Pangkal Pinang	0,54	Rendah
468	Kab. Bangka Selatan	0,65	Rendah
469	Kab. Bangka Tengah	0,56	Rendah
470	Kab. Bangka Barat	0,69	Rendah
471	Kab. Belitung Timur	0,61	Rendah
472	Kab. Boalemo	0,28	Sangat Rendah
473	Kab. Gorontalo	0,56	Rendah
474	Kota Gorontalo	0,56	Rendah
475	Kab. Pohuwato	0,34	Sangat Rendah
476	Kab. Bone Bolango	0,23	Sangat Rendah
477	Kab. Gorontalo Utara	0,40	Sangat Rendah
478	Kab. Karimun	0,71	Rendah
479	Kab. Bintan	0,47	Sangat Rendah
480	Kab. Natuna	0,66	Rendah
481	Kota Batam	2,12	Sangat Tinggi
482	Kota Tanjung Pinang	0,37	Sangat Rendah
483	Kab. Lingga	0,50	Sangat Rendah
484	Kab. Kepulauan Anambas	0,51	Sangat Rendah
485	Kab. Fakfak	0,91	Sedang
486	Kab. Manokwari	0,64	Rendah
487	Kab. Sorong	1,25	Tinggi
488	Kota Sorong	0,69	Rendah
489	Kab. Raja Ampat	1,05	Sedang
490	Kab. Sorong Selatan	0,70	Rendah
491	Kab. Teluk Bintuni	2,04	Tinggi
492	Kab. Teluk Wondama	0,66	Rendah
493	Kab. Kaimana	0,70	Rendah
494	Kab. Tambrauw	0,96	Sedang
495	Kab. Maybrat	0,67	Rendah
496	Kab. Manokwari Selatan	0,65	Rendah
497	Kab. Pegunungan Arfak	0,71	Rendah
498	Kab. Majene	0,36	Sangat Rendah
499	Kab. Mamuju	0,62	Rendah
500	Kab. Polewali Mandar	0,63	Rendah
501	Kab. Mamasa	0,47	Sangat Rendah
502	Kab. Mamuju Utara	0,45	Sangat Rendah

No.	Nama Daerah	Indek KFD	Kategori KFD
503	Kab. Mamuju Tengah	0,54	Rendah
504	Kab. Bulungan	0,81	Sedang
505	Kab. Malinau	1,41	Tinggi
506	Kab. Nunukan	0,60	Rendah
507	Kota Tarakan	0,38	Sangat Rendah
508	Kab. Tana Tidung	0,52	Sangat Rendah

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

SRI MULYANI INDRAWATI